

Tunrnitin Sunny Yonathan.pdf

By Turnitin LLC

**ANALISIS PENDAPATAN BELANJA DESA
DI DESA TANJUNG SIMPANG KECAMATAN PELANGIRAN**

SKRIPSI



OLEH :

SUNNY YONATHAN
NIM.101221010073

2

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

TEMBILAHAN

2026

**ANALISIS PENDAPATAN BELANJA DESA
DI DESA TANJUNG SIMPANG KECAMATAN PELANGIRAN**

**2
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam

Indragiri Tembilahan



OLEH :

SUNNY YONATHAN
NIM.101221010073

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN

2026

19 ABSTRAK
ANALISIS PENDAPATAN BELANJA DESA
DI DESA TANJUNG SIMPANG KECAMATAN PELANGIRAN

SUNNY YONATHAN (101221010073)
Email : sunnyyonathan0@gmail.com

2

Evaluasi terhadap kinerja finansial Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk kurun waktu 2022–2024 menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penilaian aspek kesehatan keuangan tersebut ditinjau melalui tiga parameter fundamental, meliputi Rasio Kemandirian Keuangan Desa, Rasio Efektivitas Pendapatan Desa, serta Rasio Efisiensi Belanja Desa.

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah kuantitatif asosiatif dengan desain kausal komparatif. Data sekunder yang dianalisis diperoleh langsung dari Laporan Realisasi APBDesa Desa Tanjung Simpang periode 2022–2024, di mana penentuan sampelnya mengandalkan teknik sampling jenuh.

Rangkaian analisis data mengindikasikan tiga temuan krusial: Rasio Kemandirian Keuangan Desa mencatatkan angka rata-rata sebesar 1,11%. Merujuk pada standardisasi sektor publik, capaian ini berada pada level Sangat Rendah. Rasio Efektivitas Pendapatan Desa berada pada nilai rata-rata 73,30%.

Berdasarkan acuan akuntansi sektor publik, hasil di bawah 90% ini masuk dalam klasifikasi Tidak Efektif akibat munculnya kesenjangan antara proyeksi target penganggaran dengan realisasi penerimaan kas di lapangan. Rasio Efisiensi Belanja Desa menorehkan rata-rata di angka 74,93%. Mengingat posisi persentase tersebut berada di bawah batas maksimum 80%, tata kelola pengeluaran desa dinilai Sangat Efisien karena aparaturnya berhasil mengontrol pos belanja secara cermat dan disiplin.

94

Kata Kunci : Kinerja Finansial Desa, Rasio Kemandirian, Efektivitas Pendapatan, Efisiensi Belanja, APBDesa.

ABSTRACT

Analysis of Village Revenue and Expenditure in Tanjung Simpang Village, Pelangiran District

SUNNY YONATHAN (101221010073)

Email : sunnyyonathan0@gmail.com

This study primary focuses on evaluating the financial performance of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in Tanjung Simpang Village, Pelangiran District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province, spanning the fiscal years 2022 to 2024. To assess the village's fiscal health, three fundamental indicators were applied: the Village Financial Independence Ratio, the Village Revenue Effectiveness Ratio, and the Village Expenditure Efficiency Ratio.

A quantitative associative approach with a causal-comparative research design was implemented in this study. Secondary data were gathered directly from the APBDesa Realization Reports of Tanjung Simpang Village for the 2022–2024 period, utilizing the saturated sampling method for sample selection.

The empirical findings reveal three critical insights: The Village Financial Independence Ratio recorded an average of 1.11%. According to public sector standardizations, this performance is classified as Very Low with an Instructive relationship pattern, reflecting a severe fiscal dependency on transfer funds from both regional and central governments. The Village Revenue Effectiveness Ratio reached an average of 73.30%.

Based on public sector accounting parameters, achievements below 90% fall under the Ineffective category, which stems from a substantial gap between projected budget targets and actual cash realization. The Village Expenditure Efficiency Ratio averaged 74.93%. Falling below the 80% threshold, the village's spending management is deemed Highly Efficient, demonstrating the local government's capability to enforce strict discipline and parsimony over its expenditures.

Keywords : Village Financial Performance, Independence Ratio, Revenue Effectiveness, Expenditure Efficiency, APBDesa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

³ Segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia serta rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pendapatan Belanja Desa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran”**. ³ Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Indragiri.

Penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Pendapatan Belanja Desa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran”**. ³ disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai jenjang pendidikan strata satu (S1) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri. Sholawat ⁵ teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan sepanjang zaman yang menjadi penghulu para Nabi yaitu Baginda yang tercinta Nabi Muhammad SAW. Dan ² penulis sangat berterimakasih kepada kedua orang tua beserta keluarga yang ⁴⁷ senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. ³ Proses pengerjakan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- ² 1. Bapak Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A. selaku rektor Universitas Islam Indragiri
2. Bapak Dr. Ahmad Rifa'i, S.E.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri.

3. Ibu Syafrinadina, S.E., M.M selaku ketua program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri.
4. Bapak Raju Maulana, S.E.,M.M selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, pikiran, kesabaran, dan perhatiannya dengan memberikan pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Helly Khairuddin, SE,M.Si selaku dosen Pembimbing II.
6. Bapak Drs. Dharmasetiawan, MM selaku dosen Penasehat Akademik penulis.
7. Seluruh dosen dan staf program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan ilmu dan pelayanannya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan ilmu kepada saya.
9. Rekan rekan seperjuangan Program Studi Manajemen tahun angkatan 2022 Khususnya kelas Manajemen B Universitas Islam Indragiri.
- 3 Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tembilahan, 03 Juli 2026

Penulis,

SUNNY YONATHAN

DAFTAR ISI

JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

5

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR..... x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 RUMUSAN MASALAH..... 6

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT..... 6

1.3.1 Tujuan Penelitian 6

1.3.2 Manfaat Penelitian 6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 7

BAB II TELAAH PUSTAKA..... 9

2.1 Landasan Tiori 9

2.1.1. Pengertian Manajemen..... 9

2.1.2. Pengertian Manajemen Keuangan..... 10

2.1.3. Manajemen Keuangan Desa..... 11

2.2 Pendapatan Desa 12

2.2.1. Pengertian Pendapatan Desa 12

2.2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Desa 13

2.2.3. Alokasi Pendapatan..... 15

2.3 Pengertian Belanja Desa 16

2.3.1. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... 20

2.3.2. Proses Penyusunan APBDesa 22

2.4 Penelitian Terdahulu 23

2.5 Kerangka Pemikiran..... 26

2.6 Hipotesis 27

BAB III METODE PENELITIAN..... 29

3.1. Desain Penelitian	29
3.2. Lokasi Dan Waktu Peneliti	30
3.2.1. Lokasi Peneliti.....	30
3.2.2. Waktu Peneliti.....	30
3.3. Populasi dan Sampel	30
3.3.1. Populasi.....	30
3.3.2. Sampel.....	30
3.4. Defenisi Operasional Dan Pengukuran Variabel	31
3.4.1. Variabel Independen	32
3.4.2. Variabel Dependen(Y)	33
3.5. Pengumpulan Data	33
3.5.1. Jenis dan Sumber Data	33
3.5.2. Teknik Pengumpulan Data	35
3.6. Analisis Data	35
3.6.1. Rasio Kemandirian Keuangan Desa.....	35
3.6.2. Rasio Efektivitas Pendapatan Desa	36
3.6.3. Rasio Efisiensi Belanja Desa	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	38
4.1.1. Profil Singkat Desa	38
4.1.2. Sejarah Singkat dan Perkembangan Desa	39
4.1.3. Visi dan Misi Desa	40
4.1.4. Struktur Organisasi Desa	41
4.2 Hasil Penelitian	42
4.2.1. Rasio Kemandirian Keuangan Desa.....	42
4.2.2. Rasio Efektivitas Pendapatan Desa	44
4.2.3. Rasio Efisiensi Belanja Desa	46
4.2.4. Hasil Penelitian Kinerja Keuangan Desa Tanjung	62
Simpang Periode 2022-2024	49
4.2.5. Pengujian Hipotesis Penelitian.....	50
4.3 Pembahasan.....	52
4.3.1 Analisis Kemandirian Keuangan Desa Tanjung Simpang	52

4.3.2 Analisis Efektivitas Pendapatan Desa Tanjung Simpang	52
4.3.3 Analisis Efisiensi Belanja Desa Tanjung Simpang	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 KESIMPULAN.....	55
5.2 SARAN	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	59

1
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Uraian Pendapatan Desa Dan Belanja Desa	4
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. kriteria Penilaian	36
Tabel 4. Kriteria Penilaian	36
Tabel 5. Kriteria Penilaian	37
Tabel 6. Rasio Kemandirian Keuangan Desa	44
Tabel 7. Rasio Efektivitas Pendapatan Desa.....	46
Tabel 8. Rasio Efisiensi Belanja Desa	48
Tabel 9. Hasil Penelitian Kinerja Keuangan Desa	49

DAFTAR GAMBAR

5	Gambar 1. Struktur Organisasi Desa Tanjung Simpang	41
	Gambar 2. Anggaran Desa Tanjung Simpang 2022.....	59
	Gambar 3. Anggaran Desa Tanjung Simpang 2023.....	60
	Gambar 4. Anggaran Desa Tanjung Simpang 2024.....	61

BAB I

44

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Sujarweni (2015) Untuk mencapai pembangunan pemerintahan, pemerintahan desa, yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, memiliki peran strategis dalam mengatur masyarakat pedesaan. Berdasarkan perannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, atau hak tradisional yang diakuidan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga roda pemerintah berjalan dengan baik, desa mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kondisi dan sosial budaya lokal.

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Semua pengeluaran yang dilakukan di rekening desa dianggap sebagai belanja desa dan harus dilakukan dalam satu tahun anggaran dan tidak dapat dikembalikan kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

¹ Semua pengeluaran yang dilakukan di rekening desa dianggap sebagai belanja desa dan harus dilakukan dalam satu tahun anggaran dan tidak dapat dibayar kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

³³ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah. Rencana ini menggambarkan perkiraan pengeluaran tertinggi untuk membiayai operasi dan proyek daerah selama tahun anggaran tertentu, dan menggambarkan perkiraan dan sumber penerimaan daerah untuk menutup pengeluaran tersebut (Rosalinda & Widajantie, 2021)

⁴ Sebagai hasil dari penjelasan tersebut, jelas bahwa belanja desa harus diberi prioritas utama sesuai dengan jumlah pendapatan desa yang tersedia. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa desa dapat membuat anggaran yang tepat dan efektif untuk pendapatan dan belanja desa agar tujuan pembangunan desa dapat dicapai dan agar upaya pengembangan desa tidak terbuang sia-sia.

Dengan meningkatnya alokasi anggaran desa, diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan sehingga angka kemiskinan dapat berkurang. Semakin tinggi pengeluaran anggaran untuk pembangunan, maka angka kemiskinan pun akan menurun, dan hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan desa yang akan mengakibatkan peningkatan belanja desa untuk pembangunan. Pelaksanaan pembangunan desa memerlukan pembiayaan atau sumber penerimaan desa yang mencukupi. ⁴⁷ Pendapatan desa mencakup pendapatan asli desa (PADes), dana transfer, dan pendapatan lain-lain desa. (Varina et al., 2022)

Pemahaman yang memadai mengenai administrasi keuangan desa merupakan suatu elemen krusial dan fundamental yang esensial bagi para pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan desa (pemdes), terutama bagi aparatur desa. Hal ini bertujuan untuk merealisasikan keterbukaan dan akuntabilitas finansial desa. Prinsip-prinsip pokok dalam manajemen keuangan desa mencakup seluruh tahapan, mulai dari fase perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, serta merinci kewajiban dan otoritas para pejabat yang mengelola dana tersebut. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, administrasi dana desa wajib dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan kepatuhan terhadap anggaran. Periode pengelolaan dana desa berlangsung dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember pada tahun anggaran yang bersangkutan, yang kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Purba et al., 2023)

Otonomi Daerah adalah proses pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan urusan daerah, mencakup pengelolaan sumber daya yang ada berdasarkan keputusan, prioritas, dan potensi daerah. Sebagai konsekuensi dari penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan siap untuk memikul tanggung jawab dalam mengelola sumber pendanaan dan sumber daya yang tersedia guna mewujudkan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Kurniawan, 2024)

Penyelenggaraan otonomi daerah mensyaratkan pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan yang sesuai guna memperkuat kapasitas ¹⁴ dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD berfungsi sebagai indikator utama dalam menilai tingkat kemandirian finansial suatu daerah. ³⁵ Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah merupakan tolok ukur krusial yang menunjukkan sejauh mana suatu pemerintah daerah dapat dianggap mandiri secara finansial. Tingkat kemandirian finansial pemerintah daerah, yang juga dikenal sebagai Derajat Otonomi Fiskal (DOF), didefinisikan ¹⁰¹ oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri sebagai rasio antara PAD dan total penerimaan daerah. (Ali & Nursyam, 2023)

⁴ Berikut ini adalah data pendapatan desa dan realisasi belanja desa tahun 2022 sampai dengan 2024 :

Tabel 1. Uraian Pendapatan Desa Dan Belanja Desa

NO	Uraian Desa	2022	2023	2024
1	Pendapatan	3.210.450.003.00	2.915.089.201.00	2.597.550.860.00
2	Belanja	2.120.301.784.00	2.385.091.684.00	1.997.853.014.00
3	PADes	3.100.750.875.00	3.015.890.001.00	2.976.100.098.00
4	Target Pendapatan	3.650.700.980.00	2.788.370.300.00	2.510.880.210.00

Sumber : Laporan Pendapatapan Dan Belanja Desa Tanjung Simpang

⁵⁵ Berdasarkan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Tabel 1, terlihat fluktuasi yang signifikan pada komponen penerimaan maupun pengeluaran Desa Tanjung Simpang periode 2022–2024. Realisasi pendapatan desa mencatatkan penurunan secara konsisten setiap tahunnya, yaitu dari Rp3.210.450.003.00 pada tahun 2022 menjadi Rp2.915.089.201.00 pada

tahun 2023, hingga menyusut ke angka Rp2.597.550.860.00 pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan penyesuaian target pendapatan yang juga cenderung menurun, dari Rp3.650.700.980.00 (2022) menjadi Rp2.788.370.300.00 (2023), dan Rp2.510.880.210.00 (2024). Adanya jarak (*gap*) yang dinamis antara estimasi target dan realisasi kas masuk mengindikasikan bahwa perencanaan target pendapatan desa belum sepenuhnya efektif.

Di sisi belanja, alokasi pengeluaran desa menunjukkan tren yang fluktuatif, dimulai dari Rp2.120.301.784.00 pada tahun 2022, naik menjadi Rp2.385.091.684.00 pada tahun 2023, lalu berkurang menjadi Rp1.997.853.014.00 pada tahun 2024. Selain itu, besarnya angka Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dicatat berkisar Rp2.976.100.098.00–3.100.750.875.00 memerlukan evaluasi mendalam terkait validitas pencatatan serta dampaknya terhadap tingkat kemandirian fiskal desa. Ketimpangan antara target, realisasi penerimaan, dan penggunaan belanja ini mengindikasikan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Tanjung Simpang masih menghadapi tantangan optimalisasi. Atas dasar masalah tersebut, penelitian ini krusial untuk dilakukan guna mengkaji lebih jauh ²kinerja keuangan desa melalui analisis rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi.

Pada tahun 2022, Desa Tanjung Simpang mengalami Surplus sebesar Rp1.090.148.219,00, sehingga menghasilkan sisa dana (SiLPA) bernilai positif yang signifikan di kas desa. Pada tahun 2023, Desa Tanjung Simpang kembali mengalami Surplus sebesar Rp529.997.517,00, yang menunjukkan bahwa uang yang diterima tetap lebih banyak dibanding total pengeluaran. Pada tahun 2024,

Desa Tanjung Simpang mencatatkan Surplus sebesar Rp599.697.846,00. Hal ini menandakan belanja terkelola dengan baik sehingga tetap tersisa dana simpanan kas.

Tidak Ada Defisit: Selama kurun waktu 2022–2024, Desa Tanjung Simpang tidak pernah mengalami defisit keuangan karena penerimaan kas selalu melebihi total belanja desa. Kondisi Keuangan Hemat (Sangat Efisien): Keuangan desa senantiasa dalam kondisi Surplus / SiLPA Positif tiap tahunnya, menunjukkan bahwa belanja desa terkelola secara efisien tanpa melampaui kemampuan pendapatan.

“ANALISIS PENDAPATAN BELANJA DESA DI DESA TANJUNG SIMPANG”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan di atas, maka rumusan masalah dalam peneliti ini yaitu : “Bagaimana Pendapatan Belanja Desa Tanjung Simpang Jika Di Ukur Menggunakan Rasio Kemandirian Efektifitas Dan Efisiensi ?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana Pendapatan Belanja Desa Tanjung Simpang Jika Di Ukur Menggunakan Rasio Kemandirian Efektifitas Dan Efisiensi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

a. Bagi peneliti, temuan ini dapat memperluas perspektif, pemahaman, dan kompetensi dalam ranah penelitian. Ini juga merepresentasikan penerapan pengetahuan yang diperoleh selama periode akademis, sekaligus berkontribusi pada penambahan khazanah ilmu pengetahuan.

91
b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi penulis di masa depan yang memiliki kaitan dengan studi ini. Selain itu, temuan ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam mengurai persoalan yang relevan dengan analisis 7 pendapatan dan belanja desa di Desa Tanjung Simpang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam rangka menyajikan pemahaman komprehensif terkait materi penulisan ini, penulis akan menjabarkan ringkasan konten dari setiap bab 20 secara terperinci, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang 9 dari permasalahan yang ada, perumusan pokok permasalahan, tujuan yang ingin dicapai beserta manfaat dari penelitian ini, dan diakhiri dengan penjabaran mengenai sistematika penulisan karya ilmiah ini..

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bagian ini mencakup Tinjauan Pustaka, studi-studi sebelumnya, kerangka konseptual, dan 2 hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup uraian mengenai Desain Riset, Lokasi dan Durasi Riset, Populasi dan Sampel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Pengumpulan Data, serta Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan tinjauan umum mengenai objek penelitian, temuan penelitian, serta diskusi terkait.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian ini, penulis menyajikan ringkasan temuan serta rekomendasi yang berkaitan dengan isu-isu yang telah diidentifikasi.

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Tiori

2.1.1. Pengertian Manajemen

Menurut Hasibuan (2010),⁴² manajemen didefinisikan sebagai ilmu dan seni dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya secara efektif dan efisien guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Handoko (2012) mengemukakan bahwa⁴⁹ manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap upaya anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya organisasi lainnya untuk merealisasikan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen adalah suatu seni dan ilmu dalam merencanakan, mengorganisir, memotivasi, dan mengendalikan orang serta mekanisme kerja guna mencapai tujuan. (Brunsson, 2017)

⁷¹ Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen mencakup segala aktivitas yang diarahkan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber daya demi tercapainya sasaran yang diinginkan secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa tingkatan atau level dalam manajemen, yang meliputi:

1. *Top management* (manajemen puncak) merujuk pada para eksekutif yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan keberhasilan operasional organisasi secara komprehensif.

2. *Middle level management* (manajemen tingkat menengah) Mereka adalah para administrator yang melapor kepada jajaran manajerial senior. Jabatan yang umum dipegang pada level ini mencakup ⁶¹ *general manager, plant manager, factory manager, regional manager*, atau *division manager*. Manajer pada tingkatan menengah ini memiliki tugas untuk mengimplementasikan strategi dan arahan yang ⁸⁵ telah disusun oleh manajemen puncak serta manajemen lini pertama.
3. *Lower management* (manajemen bawah) Merupakan pengelolaan yang mengawasi kegiatan operasional sehari-hari suatu entitas dan mengimplementasikan rencana yang telah disusun oleh tingkat manajemen pertengahan.

⁵⁰ 2.1.2. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah fungsi operasional bisnis yang terfokus pada pengelolaan sumber daya finansial. Praktik ini diterapkan oleh individu, organisasi, dan entitas pemerintahan. Fungsi manajemen keuangan memegang peranan krusial dalam pertumbuhan dan keberhasilan suatu perusahaan. Bidang studi ini menawarkan prospek karier yang luas dan pengembangan profesional bagi para pelakunya. (Janudin, 2024)

¹⁰⁹ Menurut Harjito dan Martono (2012) Manajemen keuangan mencakup seluruh kegiatan entitas bisnis yang berkaitan dengan perolehan dana, pemanfaatan dana, serta pengelolaan aset demi pencapaian ⁶⁵ tujuan perusahaan secara komprehensif. Dengan kata lain, manajemen keuangan adalah

pengelolaan terkait cara memperoleh aset, mendanai aset, dan mengelola aset guna memenuhi sasaran perusahaan.

2.1.3. Manajemen Keuangan Desa

Menurut Kasmir (2018) dalam Maulana (2022) Manajemen keuangan mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aset perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis. Proses ini melibatkan identifikasi sumber pendanaan yang efisien, minimalisasi biaya operasional, serta pengelolaan sumber daya finansial suatu entitas bisnis atau organisasi guna merealisasikan target ⁸² keuangan yang telah ditetapkan.

Menurut Milla (2020) Manajemen keuangan dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pengelola keuangan, mencakup pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Oleh karena itu, manajemen ³¹ keuangan desa dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Peran Manajemen Keuangan Desa

³²

1. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
2. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan perekonomian nasional.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha.
4. Sebagai lembaga pemberdayaan yang merupakan wahana integrasi sosial.

2.2 Pendapatan Desa

2.2.1. Pengertian Pendapatan Desa

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya pada Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan didefinisikan sebagai seluruh penerimaan pada kas umum negara/daerah yang berakibat pada peningkatan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran terkait. Pendapatan ini merupakan hak pemerintah dan tidak diwajibkan untuk dikembalikan oleh pemerintah. (Hernusa dan Royani, 2022)

Definisi pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) konsisten dengan definisi pendapatan yang tercantum dalam peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Islamiyah dan Faidati, 2022)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Desa, pendapatan desa didefinisikan sebagai seluruh penerimaan kas yang masuk ke rekening desa, yang menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran dan tidak memerlukan kewajiban pembayaran kembali oleh desa (Masruroh, 2022)

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), pendapatan didefinisikan sebagai peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain yang berasal dari kontribusi investor. Pendapatan timbul dari aktivitas bisnis yang lazim dilakukan entitas selama

periode pelaporan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kekayaan bersih entitas (Arvita, 2022)

Menurut Noerdiawan et al (2017) menyatakan secara umum pendapatan diakui sebagai:

- a. Diperoleh yaitu ketika entitas telah menyelesaikan secara substansial apa yang menjadi kewajibannya, penyelesaiannya kewajiban inilah yang akan menjadi pendapatan ketika seluruh proses selesai.
- b. Sudah direalisasikan/dapat direalisasikan, yaitu ketika kas/piutang sudah diterima atas penyerahan barang/jasa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun.

2.2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan pemerintah daerah cenderung dapat diprediksi dan lebih stabil karena diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah yang mengikat dan dapat ditegakkan. Berbeda dengan sektor bisnis, yang sangat dipengaruhi oleh pasar yang tidak pasti dan bergejolak, sehingga pendapatannya bersifat fluktuatif. Dalam sistem pasar yang sempurna, di mana tidak ada monopoli atau oligopoli, perusahaan tidak dapat memaksa konsumen untuk membeli produk atau layanan, yang merupakan sumber pendapatan utama perusahaan. Agar pemerintah daerah dapat mengelola pendapatan secara optimal, langkah pertama yang perlu diambil adalah mengidentifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah/Des (Nasir, 2019)

27
Walaupun pemerintah daerah telah memperoleh otonomi ekstensif dan desentralisasi fiskal, implementasi otonomi tersebut wajib tetap mematuhi kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 53
Pendapatan Transfer Desa.

- a. Dana Desa adalah alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dana ini disalurkan melalui APBDesa kabupaten/kota dan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kegiatan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan anggaran Dana Desa secara nasional di dalam APBDesa.
- 23
b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah
- c. Alokasi Dana Desa (ADD)
- 27
d. Pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, berkewajiban menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. Alokasi dana desa merupakan komponen dari dana pertimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan besaran minimal 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Mekanisme pengalokasian ADD diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati/walikota, yang berpedoman pada peraturan menteri. Pengalokasian ADD kepada masing-masing desa dilakukan dengan mempertimbangkan:

9

a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa

b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa/Bantuan Keuangan dari PBD Provinsi

Pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, atau kota berwenang untuk menyalurkan bantuan finansial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) provinsi/kabupaten/kota kepada desa. Pemberian bantuan ini harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing pemerintah daerah. 115 Tujuan utama dari bantuan ini adalah untuk mengakselerasi program pembangunan di tingkat desa.

a. Bantuan keuangan APBDesa kabupaten/kota.

28

b. Bagi hasil lainnya.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kategori pendapatan desa lain yang sah mencakup hibah dan donasi dari entitas eksternal yang tidak memiliki persyaratan khusus. Ini termasuk pemberian dana 11 dari pihak ketiga, hasil kolaborasi dengan pihak ketiga, atau bantuan yang diberikan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah desa.

2.2.3. Alokasi Pendapatan

Fase final dalam siklus pengelolaan pendapatan adalah distribusi pendapatan. Tahap ini melibatkan proses pengambilan keputusan terkait pemanfaatan dana yang tersedia untuk mendanai berbagai pos pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah mencakup belanja operasional dan belanja modal.

Selain itu, distribusi pendapatan juga diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran, seperti ⁷⁵ pembentukan dana cadangan, investasi modal oleh pemerintah daerah, pengelolaan utang, dan pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah.

⁸ 2.3 Pengertian Belanja Desa

Belanja Desa mencakup seluruh pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak dapat diperoleh kembali pembayarannya oleh desa. Dana belanja desa dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Berdasarkan ⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), khususnya pada pernyataan standar akuntansi pemerintah Nomor 3 tentang Laporan Arus Kas, belanja didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengakibatkan penurunan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran terkait dan tidak akan diterima kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Definisi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tersebut konsisten dengan definisi belanja yang tercantum dalam peraturan sebelumnya, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran yang bersumber dari rekening desa yang menjadi tanggung jawab desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan memperoleh penggantian pembayaran dari pihak desa. Belanja desa diarahkan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa.

Dalam konteks akuntansi pemerintahan di Indonesia, belanja diartikan sebagai seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara umum negara/desa yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana lancar pada periode tahun anggaran terkait, serta tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2005.

Belanja Dapat Diklasifikasikan Menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi merupakan sebuah sistem pengelompokan pengeluaran yang berfokus pada sifat dari aktivitas belanja yang dilakukan. Di tingkat pemerintah daerah, klasifikasi ekonomi mencakup berbagai kategori seperti pengeluaran untuk pegawai, pengadaan barang dan jasa, modal, bunga pinjaman, subsidi, hibah, bantuan sosial, serta pengeluaran yang bersifat tidak terduga..
- b. Klasifikasi ini merujuk pada pengelompokan yang didasarkan pada unit organisasi dari pengguna anggaran.

- c. Pengklasifikasian berdasarkan fungsi adalah suatu metode pengelompokan yang berfokus pada tugas-tugas esensial yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau daerah dalam rangka menyediakan layanan bagi public.

Berdasarkan ¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, pengeluaran dikategorikan sebagai belanja pada saat terjadinya pembayaran ¹⁹ oleh bendahara umum negara atau daerah yang berdampak pada penurunan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran terkait dan tidak dapat dikembalikan kepada pemerintah. Sangat mungkin terjadi penyesuaian terhadap pos belanja dalam tahun anggaran yang sedang berjalan.

Pengeluaran desa mencakup seluruh transaksi yang bersumber dari ⁵⁵ kas desa yang bersifat kewajiban desa dalam kurun waktu satu tahun anggaran dan tidak diharapkan untuk dikembalikan kepada desa. Dana belanja desa dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh ²⁰ desa.

Klasifikasi belanja desa meliputi beberapa kategori.

- a. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa,
- b. Untuk pelaksanaan pembangunan di desa,
- c. Untuk pembinaan aspek kemasyarakatan desa,
- d. Untuk pemberdayaan seluruh elemen masyarakat desa, serta
- e. Untuk belanja yang bersifat tidak terduga..

Selanjutnya, alokasi belanja desa akan diklasifikasikan ke dalam berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas desa sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa. Rincian mengenai bidang dan kegiatan tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 mengenai pedoman pembangunan desa, dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi:

- a. Penentuan dan penetapan batas-batas wilayah desa
- b. Sumber pendapatan desa
- c. Perancangan tata ruang desa
- d. Pelaksanaan forum musyawarah desa
- e. Manajemen informasi desa
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan desa
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- h. Pelaksanaan kemitraan antar desa
- i. Pengembangan fasilitas dan infrastruktur kantor desa aktivitas-aktivitas lain yang relevan dengan kondisi spesifik desa

2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain:

- a. Pengembangan, penggunaan, dan perawatan fasilitas desa dan lingkungan sekitar.
- b. Pengembangan, penggunaan, dan perawatan fasilitas kesehatan meliputi berbagai aspek, seperti:

1. Air bersih berskala desa

2. Mengadakan gotong royong

3. Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu

- c. Upaya untuk memajukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan serta membangun, menggunakan, dan merawat fasilitas dan infrastruktur ekonomi, termasuk namun tidak terbatas pada:

95

1. Pendirian dan peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

2. Peningkatan modal untuk BUMDesa

3. Area yang berkaitan dengan pembinaan komunitas desa, mencakup:

a. Pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur olahraga

b. Bimbingan terhadap organisasi adat

11

4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa antara lain:

a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.

b. Peningkatan kapasitas masyarakat

5

2.3.1. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diformulasikan sebagai acuan bagi penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Dengan demikian, APBDesa memberikan gambaran yang komprehensif kepada pemerintah desa mengenai proyeksi pendapatan yang akan diterima dan alokasi belanja yang akan dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Penerapan APBDesa sebagai panduan operasional berkontribusi pada pencegahan kekeliruan, inefisiensi, serta penyalahgunaan dana yang dapat menimbulkan kerugian (Rosidah dan Widjantie, 2022).

102

51

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

16

APBDesa memiliki beberapa fungsi esensial, yakni:

1. Fungsi otorisasi

Dokumen anggaran desa berfungsi sebagai fondasi untuk merealisasikan penerimaan dan pengeluaran desa selama periode tahunan yang ditetapkan.

16

2. Fungsi perencanaan

Anggaran desa berperan sebagai panduan bagi pihak manajemen dalam menyusun rencana aktivitas untuk tahun berjalan.

3. Fungsi Pengawasan

Anggaran desa menyediakan tolok ukur untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program pemerintah desa dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

Alokasi anggaran desa harus difokuskan pada upaya penciptaan peluang kerja atau pengurangan angka pengangguran, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya dan peningkatan efektivitas ekonomi.

5. Fungsi otorisasi

Dokumen anggaran desa berfungsi sebagai fondasi untuk merealisasikan penerimaan dan pengeluaran desa selama periode tahunan yang ditetapkan.

6. Fungsi perencanaan

Anggaran desa berperan sebagai panduan bagi pihak manajemen dalam menyusun rencana aktivitas untuk tahun berjalan.

7. Fungsi Pengawasan

Dokumen anggaran desa berfungsi sebagai acuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dengan peraturan yang berlaku.

8. Fungsi Alokasi

Alokasi anggaran desa hendaknya ditujukan untuk memfasilitasi penciptaan lapangan kerja atau menekan angka pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta mendorong peningkatan efisiensi ekonomi.

16

Sedangkan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa menurut

(Halim, 2007) :

1. Pendapatan dan pengeluaran untuk periode waktu yang telah ditentukan.
2. Peran Perencanaan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berfungsi sebagai panduan bagi pengelolaan dalam menyusun rencana aktivitas untuk tahun yang telah ditetapkan.
3. Peran Pengawasan: APBDesa menjadi acuan untuk mengevaluasi kepatuhan penyelenggara pemerintahan daerah terhadap peraturan yang berlaku.
4. Peran Alokasi: APBDesa diharapkan dapat mendukung penciptaan peluang kerja, meminimalkan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi.

2.3.2. Proses Penyusunan APBDesa

Menurut Yudartha dan Winaya (2018) penyusunan APBDesa merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan desa yang bersifat partisipatif,

96

transparan, dan akuntabel. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil masyarakat desa melalui pendekatan *bottom-up planning*.

Adapun tahapan penyusunannya adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa (Musdes) tahap awal dimulai dengan Musdes yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Dalam forum ini dibahas berbagai kebutuhan dan prioritas pembangunan desa sebagai dasar penyusunan rencana kerja.
2. Penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) hasil Musdes kemudian dijabarkan dalam RKPDes. Dokumen ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan menjadi dasar utama dalam penyusunan APBDesa.
3. Penyusunan perencana APBDesa, Pemerintah desa menyusun rancangan APBDesa berdasarkan RKPDes dengan memperhatikan sumber pendapatan desa, seperti dana desa, alokasi dana desa (ADD), dan pendapatan asli desa.
4. Pembahasan Bersama BPD, rancangan APBDesa yang telah disusun kemudian dibahas bersama BPD. Tahap ini penting untuk memastikan adanya fungsi pengawasan serta keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan desa.
5. Evaluasi Oleh Pemerintah Daerah, setelah disepakati, rancangan APBDesa disampaikan kepada pemerintah daerah (biasanya melalui camat) untuk

dievaluasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penetapan APBDesa, setelah melalui evaluasi, kepala desa menetapkan APBDesa menjadi peraturan desa (Perdes) yang sah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran desa.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Tahun Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rita Martini, Zulkifli Zulk ifli,Sukmini Hartati,Enda h Widyastuti (2019)Polite knik Negeri Sriwijaya	Peran Pendapatan Desa Untuk Belan ja Desa Di Kabup aten Lahat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pades, DD, ADD, dan BHPR memiliki pengaruh simultan terhadap belanja desa. Secara parsial, DD dan ADD terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Sebagian besar desa di Kabupaten Lahat mengalokasikan dana transfer untuk belanja desa. Pades tidak dapat dialokasikan ke dalam belanja desa karena jumlah yang kecil. Tumpang tindih peraturan pusat dan daerah juga menyebabkan BHPR sulit dialokasikan untuk belanja desa.
2	Ratna Sari D ewi Ova Nov i Irama (2019)Univesitas Muslim Nusa ntara Al-Was hliyah	Pengaruh Pendap atan Desa Dan Al okasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemisk inan	Pendapatan desa (x_1) berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan (y_2) sebesar 0,297. Sementara itu, efek tidak langsung dari pendapatan desa (x_1) terhadap kemiskinan (y_2) yang dimediasi oleh belanja desa (y_1) adalah -0,167. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung ($0,297 > -0,167$). Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa belanja desa (y_1) tidak berfungsi sebagai variabel mediasi antara pendapatan desa (x_1) dan kemiskinan (y_2). Selanjutnya, koefisien jalur pengaruh l

No	Nama Tahun Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	slam Majapahit Mojokerto		patan desa mampu menutupi 47% dari belanja desa di Desa sambilawan g, sementara sisa kebutuhan belanja masih memerlukan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat
5	Wida Puspawardani.(2020)	Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran	Berdasarkan hasil pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara umum sudah dapat terkelola dengan baik sesuai dengan pendapat Adisasmita (2014:34) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Ada pula beberapa hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa diantaranya keterlambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga perangkat desa kesulitan dalam proses penyusunan APBDesa, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan sebelumnya karena adanya kebijakan yang berubah-ubah, dan ada pula upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa,.

Sumber : Data Diolah (2026)

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan ¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), khususnya pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 3 tentang Laporan Arus Kas, dijelaskan bahwa belanja mencakup seluruh pengeluaran yang bersumber dari rekening kas umum negara/daerah. Pengeluaran ini berakibat pada penurunan ⁴⁸ ekuitas dana lancar dalam kurun waktu tahun anggaran yang relevan, dengan ketentuan bahwa pembayaran kembali atas

pengeluaran tersebut tidak akan diterima oleh pemerintah. (Suarsini et al., 2024)

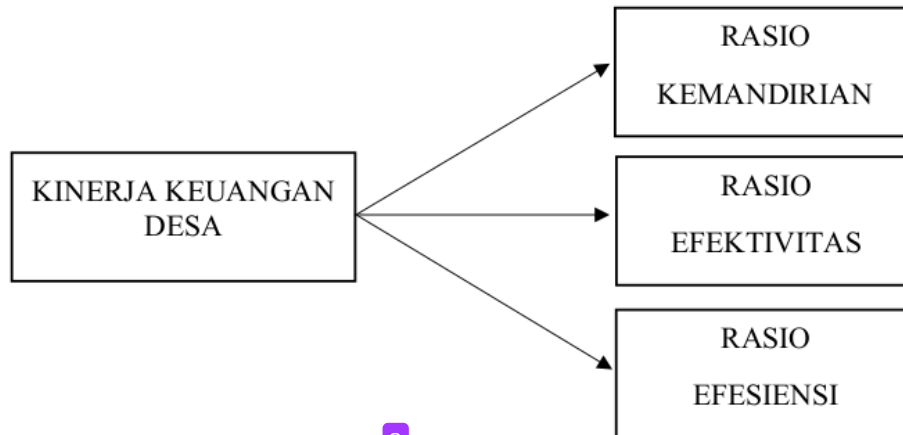
Berdasarkan ⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan didefinisikan sebagai seluruh penerimaan pada kas umum negara/daerah yang berakibat pada peningkatan ekuitas dana lancar dalam kurun waktu tahun anggaran terkait, yang merupakan hak pemerintah dan tidak memerlukan kewajiban pembayaran kembali oleh pemerintah..

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), khususnya ¹⁰ pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 3 tentang Laporan Arus Kas, belanja didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum negara atau daerah. Pengeluaran ini mengakibatkan ³⁴ penurunan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran terkait, dan tidak diharapkan akan diterima kembali pembayarannya oleh pemerintah. (Suarsini et al., 2024)

Sesuai dengan ¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan didefinisikan sebagai seluruh penerimaan pada rekening kas umum negara/daerah yang berimplikasi pada peningkatan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran terkait, yang merupakan hak

pemerintah dan tidak memerlukan kewajiban pembayaran kembali oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:



3
Gambar. Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai suatu permasalahan yang memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya. Berlandaskan kajian teoretis, ⁶⁰ penelitian sebelumnya, dan kerangka konseptual yang ada, maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₁. Tingkat kemandirian keuangan Desa Tanjung Simpang masih tergolong dalam kriteria rendah.

H₂. Kinerja pendapatan Desa Tanjung Simpang dikategorikan sangat efektif.

H₃. Pengelolaan belanja Desa Tanjung Simpang dikategorikan sangat efisien.

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *explanatory research*, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (*causal comparative research*). Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Rondonuwu et al., 2018). variabel independen (variabel yang mempengaruhi) yaitu Pendapatan Desa serta variabel dependen (variabel yang dipengaruhi) yaitu Belanja Desa.

Menurut Sugiyono (2018) Metode kuantitatif didefinisikan sebagai sebuah pendekatan riset yang berakar pada filsafat positivisme. Metode ini diaplikasikan untuk mengkaji populasi atau sampel yang spesifik, dengan proses pengumpulan data melalui instrumen penelitian. Analisis data yang dihasilkan bersifat kuantitatif atau statistik, serta bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan asosiatif, yang berfokus pada upaya untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel, dalam konteks Analisis Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tanjung Simpang.

3.2. Lokasi Dan Waktu Peneliti

3.2.1. Lokasi Peneliti

Peneliti ini dilakukan di kantor Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragir Hilir.

3.2.2. Waktu Peneliti

Penelitian ini direncanakan pada bulan November 2025 s.d selesai.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2018) Populasi merujuk pada cakupan generalisasi yang terdiri dari entitas atau subentitas dengan atribut dan karakteristik spesifik yang ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam studi ini mencakup Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang berlokasi di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran.

3.3.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2018) Sampel merupakan perwakilan dari keseluruhan data yang memiliki jumlah dan atribut tertentu dari suatu populasi. Apabila populasi sangat luas dan tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mengamati seluruh anggotanya, dikarenakan keterbatasan sumber daya seperti finansial, personel, dan waktu, maka penelitian dapat

dilakukan dengan menggunakan sebagian data yang diambil dari populasi tersebut. Metode yang diterapkan dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan *sampling jenuh*, yang melibatkan pemilihan unit analisis berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. (Sugiyono 2018)

Metode pengambilan sampel adalah sebuah cara yang diterapkan untuk memperoleh sampel guna memastikan keterwakilannya terhadap populasi. Berbagai jenis metode pengambilan sampel telah disediakan agar prosedur pengumpulan sampel menjadi akurat dan representatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan metode penentuan sampel ketika seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini meliputi data terkait Anggaran Pendapatan Desa dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), serta data mengenai Anggaran Belanja Desa dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

3.4. Defenisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Menurut Saputri dan Rahayu (2023) variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Pada penelitian ini terdapat dua

variabel yaitu Variabel Independen 1 (Pendapatan Desa), dan Variabel Dependen (Belanja Desa).

3.4.1. Variabel Independen

3.4.1.1. Pendapatan Desa (X)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan didefinisikan sebagai seluruh penerimaan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengakibatkan peningkatan ekuitas dana lancar dalam tahun anggaran berjalan. Pendapatan ini merupakan hak pemerintah yang tidak memiliki kewajiban untuk dikembalikan.

Definisi pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tersebut konsisten dengan definisi yang diatur dalam peraturan terdahulu, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

3.4.2. Variabel Dependen(Y)

3.4.2.1. ⁴ Belanja Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 3 tentang Laporan Arus Kas, belanja didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran yang berasal dari Kas Umum Negara/Daerah. Pengeluaran ini mengakibatkan penurunan ³⁴ ekuitas dana lancar dalam suatu tahun anggaran dan tidak diharapkan akan diterima kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Definisi belanja yang termaktub dalam ⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini konsisten dengan definisi yang diatur dalam peraturan sebelumnya, yaitu ⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

² 3.5. Pengumpulan Data

3.5.1. Jenis dan Sumber Data

Informasi yang dihimpun bersifat tepat dan terstruktur, yang memungkinkan analisis dan interpretasi data yang memadai, serta penyusunan kesimpulan yang selaras dengan objektif penelitian. Data

memegang peranan krusial dalam setiap investigasi ilmiah, berfungsi sebagai fondasi esensial bagi diskursus mengenai suatu subjek. ²⁴ Sumber data yang digunakan dalam studi ini mencakup data sekunder dan primer.

Informasi yang dihimpun bersifat tepat dan terstruktur, yang memungkinkan analisis dan interpretasi data yang memadai, serta penyusunan kesimpulan yang selaras dengan objektif penelitian. Data memegang peranan krusial dalam setiap investigasi ilmiah, berfungsi sebagai fondasi esensial bagi diskursus mengenai suatu subjek. ⁷⁴ Sumber data yang digunakan dalam studi ini mencakup data sekunder dan primer.

¹⁵ Sumber utama yang akan digunakan sebagai dasar rujukan dalam penelitian ini mencakup jurnal, artikel, buku, serta bahan bacaan atau dokumen lain yang berkaitan dengan manajemen kinerja keuangan daerah. ¹⁵ Data pendukung atau referensi sekunder yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai pelengkap data primer adalah jurnal, artikel, buku, dan sumber bacaan atau dokumen lain yang relevan dengan manajemen keuangan daerah dan belanja langsung. Rincian mengenai ¹⁵ literatur yang telah dimanfaatkan oleh penulis dalam penelitian ini akan disajikan dalam lampiran berupa tabel, sesuai dengan topik pembahasan dari setiap literatur tersebut.

3.5.2. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Sumber bacaan yang dicari, dipilih, dianalisis, dan disajikan menjadi sumber data sesuai dengan tema penelitian digunakan sebagai metode pengumpulan data ¹⁵ dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang relevan untuk studi literatur ini. Data penelitian ini akan disajikan dalam bentuk kata yang sudah diolah agar ringkas dan sistematis.

⁷ 3.6. Analisis Data

Analisis rasio keuangan desa digunakan dalam penelitian ini. Tujuan analisis ¹¹³ ini adalah untuk mengevaluasi kinerja pendapatan dan belanja. Sebagai informasi yang dikumpulkan ⁹² dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Desa Tanjung Simpang Rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi adalah rasio ¹ yang digunakan dalam penelitian ini.

3.6.1. Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Melalui rasio kemandirian, dapat dilihat kapasitas desa dalam membiayai urusan pemerintahan dan pembangunannya sendiri dengan mengandalkan PADes. Semakin tinggi rasionya, semakin kecil ¹⁸ ketergantungan desa pada dana transfer dari pusat dan daerah.

Rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa (PADes)}}{\text{Total Pendapatan Desa}} = 100\%$$

Tabel 3. kriteria Penilain

Persentase %	Kriteria	Tingkat Kemandirian
0% – 25%	Sangat Rendah	Instruktif
>25% – 50%	Rendah	Konsultatif
>50% – 75%	Sedang	Partisipatif
>75% – 100%	Tinggi	Mandiri

3.6.2. Rasio Efektivitas Pendapatan Desa

Melalui rasio efektivitas, dapat diketahui tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan desa jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada APBDesa.

Rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Desa}}{\text{Target Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Penilaian

Persentase %	Kriteria
< 90%	Tidak Efektif
90% – 99%	Cukup Efektif
100%	Efektif
> 100%	Sangat Efektif

3.6.3. Rasio Efisiensi Belanja Desa

Rasio efisiensi digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pengelolaan belanja desa dengan membandingkan realisasi belanja desa terhadap realisasi pendapatan desa.

Rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Tabel 5. Kriteria Penilaian

Persentase %	Kriteria
< 60%	Sangat Efisien
60% – 80%	Efisien
80% – 90%	Cukup Efisien
> 90%	Tidak Efisien

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Entitas ini merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul serta prakarsa lokal. Guna mengoptimalkan fungsi pemerintahan dan pembangunan, Desa Tanjung Simpang mengimplementasikan APBDesa sebagai dokumen tahunan yang merepresentasikan fungsi perencanaan, otorisasi, dan pengawasan finansial.

Komponen pendapatan publik desa tersebut bersumber dari PADes, pendapatan transfer (Dana Desa, ADD, dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi), serta pendapatan lain yang sah. Selanjutnya, seluruh pendapatan tersebut dialokasikan melalui belanja desa yang terbagi ke dalam lima bidang utama: penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan belanja tidak terduga.

4.1.1. Profil Singkat Desa

Dahulu, Desa Tanjung Simpang hanyalah hamparan semak belukar serta kebun karet dan sagu yang sudah tua, dengan sungai di tengahnya yang mengalir sampai Desa Simpang Kateman. Sungai ini menjadi akses lintasan bagi penduduk desa-desa tradisional di sekitarnya yang melakukan perladangan berpindah di sepanjang tepiannya.

Menurut sejarah ibukota simpang kateman dahulu adalah desa tanjung simpang yang mana kepala desanya adalah orang asli tanjung simpang, bernama Ikatun Jimat, pada tahun 1996 Moh. Kadius mendirikan kopras unit desa, yang bernama telesung jaya. Sebagai orang asli tanjung simpang pak Kadius menilai daerah simpang kateman sangat luas, kemudian beliau berencana ingin memekarkan tanjung simpang menjadi sebuah desa terpisah dengan desa simpang kateman.

Pada tahun 1999 diadakan rapat di tanjung simpang untuk memekarkan diri dari desa simpang kateman. Pada awal tahun 2000 tanjung simpang memekarkan diri dari desa simpang kateman. Pada akhir tahun 2000 desa tanjung simpang didefinisikan menjadi desa tanjung simpang yang beribukota dipasar tanjung simpang. Kemudian desa simpang kateman memindahkan ibukota desanya dilubuk kempas. Pada awal berdirinya desa tanjung simpang kepala desa dijabat oleh Moh. Kadius sebagai kepala desa PJS.

4.1.2. Sejarah Singkat dan Perkembangan Desa

Dahulu, wilayah Desa Tanjung Simpang merupakan kawasan semak belukar, kebun karet, dan kebun sagu. Di tengah wilayah ini, terdapat aliran sungai menuju Desa Simpang Kateman yang menjadi jalur transportasi utama bagi warga setempat, yang saat itu masih hidup berpindah-pindah untuk berladang.

Secara historis, Tanjung Simpang awalnya adalah ibu kota atau pusat pemerintahan Desa Simpang Kateman dengan kepala desa pertama

bernama Ikatun Jimat. Perkembangan wilayah mulai terlihat pada tahun 1996 ketika Moh. Kardius mendirikan KUD Telesung Jaya. Mengingat wilayah Simpang Kateman yang terlalu luas dan demi meningkatkan pelayanan publik, Moh. Kardius mengusulkan agar Tanjung Simpang dipisahkan (dimekarkan) menjadi desa sendiri.

Rencana pemekaran tersebut disepakati melalui rapat warga pada tahun 1999 dan mulai terwujud pada awal tahun 2000. Pada akhir tahun 2000, Tanjung Simpang resmi menjadi desa mandiri (definitif) dengan ibu kota di Pasar Tanjung Simpang. Akibat pemekaran ini, Desa Simpang Kateman memindahkan ibu kotanya ke Lubuk Kempas. Untuk menjalankan pemerintahan pertama di desa baru tersebut, Moh. Kardius ditunjuk sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Desa.

83 4.1.3. Visi dan Misi Desa

Pada bagian ini, visi dan misi kepala desa terpilih disajikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat. Hal ini memungkinkan warga untuk terus mengontrol apakah pelaksanaan program kerja sudah sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan kepala desa guna memajukan desa.

a. Visi

90
Penyebarluasan informasi mengenai visi kepala desa bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arah kebijakan strategis dan target pembangunan jangka panjang yang hendak diwujudkan demi kemajuan desa.

b. Misi

Misi desa berfungsi sebagai instrumen kendali dan indikator evaluasi bagi masyarakat dalam memantau serta menilai akuntabilitas pelaksanaan program kerja berkala, guna memastikan keselarasan antara realisasi pembangunan dengan komitmen politik yang telah disepakati.

76

4.1.4. Struktur Organisasi Desa

Gambar 1. Struktur Organisasi Desa



Sumber : Data Desa Tanjung Simpang

4.2 Hasil Penelitian

Berpatokan pada basis data APBDesa yang disajikan dalam latar belakang penelitian, perincian angka keuangan Desa Tanjung Simpang kurun waktu 2022–2024 mencakup akumulasi sebagai berikut:

1. Tahun 2022 : Realisasi Pendapatan senilai Rp3.210.450.003,00; Realisasi Belanja sebesar Rp2.120.301.784,00; Perolehan PADes sebesar Rp3.100.750.875,00; serta Target Pendapatan yang diproyeksikan Rp3.650.700.980,00.
2. Tahun 2023 : Realisasi Pendapatan senilai Rp2.915.089.201,00; Realisasi Belanja sebesar Rp2.385.091.684,00; Perolehan PADes sebesar Rp3.015.890.001,00; serta Target Pendapatan yang diproyeksikan Rp2.788.370.300,00.
3. Tahun 2024 : Realisasi Pendapatan senilai Rp2.597.550.860,00; Realisasi Belanja sebesar Rp1.997.853.014,00; Perolehan PADes sebesar Rp2.976.100.098,00; serta Target Pendapatan yang diproyeksikan Rp2.510.880.210,00.

4.2.1. ³⁰ Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Rasio Kemandirian Keuangan Desa merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan Pemerintah Desa Tanjung Simpang ⁸⁶ dalam membiayai aktivitas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara mandiri dengan mengoptimalkan sumber daya internal desa. Sumber daya internal fiskal ini direpresentasikan secara riil oleh nilai Pendapatan Asli

Desa (PADes). Rasio ini merefleksikan tingkat ketergantungan (dependensi) fiskal pemerintah desa terhadap pihak eksternal, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyalurkan dana transfer (seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi).

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa (PADes)}}{\text{Total Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Rumus :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa (PADes)}}{\text{Total Pendaapatan Desa}} \times 100\%$$

Tahun 2022 :

$$\text{Rasio 2022} = \frac{3.100.750.875}{3.210.450.003} \times 100\% = 96,58\%$$

Tahun 2023 :

$$\text{Rasio 2023} = \frac{3.015.890.001}{2.915.089.201} \times 100\% = 103,46\%$$

Tahun 2024 :

$$\text{Rasio 2024} = \frac{2.976.100.089}{2.597.550.860} \times 100\% = 114,57\%$$

Tabel 6. Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Tahun	PADes	Total Pendapatan Desa	Persentase	Kemandirian
2022	3.100.750.875,00	3.210.450.003,00	100%	96,58%
2023	3.015.890.001,00	2.915.089.201,00	100%	103,46%
2024	2.976.100.098,00	2.597.550.860,00	100%	114,57%

Sumber : Data Diolah 2026

Mengindikasikan bahwa kemampuan mandiri Desa Tanjung Simpang dalam ranah pembiayaan menunjukkan perkembangan yang teramat kokoh sepanjang periode 2022–2024. Pada tahun 2022, tingkat kemandirian desa terhitung sebesar 96,58% yang sudah berada pada kategori tinggi. Nilai ini mengalami kenaikan berkelanjutan menjadi 103,46% pada rentang tahun 2023 dan menyentuh angka 114,57% pada kurun waktu 2024. Mengacu pada hasil rata-rata tiga tahunan sebesar 104,87%, dapat ditegaskan bahwa Desa Tanjung Simpang telah berhasil melepaskan ketergantungan finansial dari dana bantuan/transfer luar, mengingat kapasitas pendapatan internalnya (PADes) terbukti teramat dominan dalam menyokong kebutuhan anggaran wilayah.

4.2.2. ¹⁷ Rasio Efektivitas Pendapatan Desa

Rasio Efektivitas Pendapatan Desa digunakan untuk menilai dan mengukur kemampuan Pemerintah Desa Tanjung Simpang dalam merealisasikan target penerimaan pendapatan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya di dalam dokumen APBDesa. Rasio ini membandingkan kesesuaian antara estimasi kemampuan perencanaan

(target/anggaran) dengan kemampuan eksekusi riil di lapangan (realisasi penerimaan hasil). Efektivitas yang tinggi menandakan bahwa manajemen keuangan desa memiliki perencanaan anggaran yang realistis dan didukung oleh penyerapan fiskal yang optimal.

Adapun rumus matematika yang digunakan adalah ⁸⁹ sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = (\text{Realisasi Penerimaan} / \text{Target Pendapatan}) \times 100\%$$

Rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Tahun 2022 :

$$\text{Rasio 2022} = \frac{3.210.450.003}{3.650.700.980} \times 100\% = 87,98\%$$

Tahun 2023 :

$$\text{Rasio 2023} = \frac{2.915.089.201}{2.788.370.300} \times 100\% = 104,54\%$$

Tahun 2024 :

$$\text{Rasio 2024} = \frac{2.597.550.860}{2.510.880.210} \times 100\% = 103,45\%$$

17
Tabel 7. Rasio Efektivitas Pendapatan Desa

Tahun	Realisasi Penerimaan	Target Pendapatan	Persentase	Efektivitas
2022	3.210.450.003,00	3.650.700.980,00	100%	87,94%
2023	2.915.089.201,00	2.788.370.300,00	100%	104,54%
2024	2.597.550.860,00	2.510.880.210,00	100%	103,45%

Sumber : Data Diolah 2026

Dinamika pencapaian target pendapatan di Desa Tanjung Simpang, pada tahun anggaran 2022, efektivitas penerimaan berada di tingkat 87,94% (masuk kategori tidak efektif) dikarenakan pemetakan target awal yang dinilai terlalu memuat ekspektasi tinggi. Kendati demikian, pembenahan perencanaan anggaran pada tahun 2023 dan 2024 terbukti sukses membawa realisasi pendapatan melampaui targetnya dengan capaian masing-masing 104,54% dan 103,45% (berpredikat sangat efektif). Apabila ditinjau dari rata-rata keseluruhan yang menyentuh 98,64%, maka kinerja penerimaan instansi ini tergolong Cukup Efektif dan menunjukkan peningkatan kematangan dalam memproyeksikan potensi pendapatan desa.

4.2.3. Rasio **100** Efisiensi Belanja Desa

Rasio Efisiensi Belanja Desa dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kehematan, ketepatan, dan rasionalisasi penyerapan anggaran pengeluaran (belanja) oleh pemerintah desa. Rasio ini membandingkan seberapa besar realisasi pengeluaran belanja yang dihabiskan untuk menghasilkan sejumlah realisasi pendapatan atau penerimaan yang

diperoleh pada tahun anggaran yang sama. Pengelolaan belanja dikatakan efisien apabila pemerintah desa mampu meminimalkan input anggaran belanja tanpa mengurangi kualitas capaian target output, atau setidaknya pengeluaran dikendalikan secara ketat agar tidak melampaui total pendapatan kas yang tersedia.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = (\text{Realisasi Belanja Desa} / \text{Realisasi Pendapatan}) \times 100\%$$

Rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Tahun 2022 :

$$\text{Rasio 2022} = \frac{2.120.301.784}{3.210.450.003} \times 100\% = 66,04\%$$

Tahun 2023 :

$$\text{Rasio 2023} = \frac{2.385.091.684}{2.915.089.201} \times 100\% = 81,82\%$$

Tahun 2024 :

$$\text{Rasio 2024} = \frac{1.997.853.014}{2.597.550.860} \times 100\% = 76,96\%$$

Tabel 8. Rasio Efisiensi Belanja Desa

Tahun	Realisasi Belanja Desa	Realisasi Pendapatan	Persentase	Efisiensi
2022	2.120.301.784.00	3.210.450.003.00	100%	66,04%
2023	2.385.091.684.00	2.915.089.201.00	100%	81,82%
2024	1.997.853.014.00	2.597.550.860.00	100%	76,91%

97

Sumber : Data Diolah 2026

Berdasarkan hasil kalkulasi di atas, diperoleh persentase rasio efisiensi sebesar 66,04% pada tahun 2022, 81,82% pada tahun 2023, serta 76,91% pada tahun 2024. Melalui tren fluktuatif tersebut, tercatat nilai rata-rata rasio efisiensi belanja secara kumulatif mencapai 74,93%. Mengacu pada standardisasi pengukuran kinerja sektor publik, capaian rasio yang berada di bawah ambang batas 80% diklasifikasikan ke dalam kriteria sangat efisien. Kondisi empiris ini merefleksikan keberhasilan Pemerintah Desa Tanjung Simpang dalam menerapkan prinsip kedisiplinan anggaran. Pengendalian terhadap pos pengeluaran secara ketat berdampak positif pada terciptanya surplus fiskal berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang memadai di akhir tahun, yang pada gilirannya dapat memperkuat stabilitas likuiditas keuangan desa.

4.2.4. Hasil Penelitian Kinerja Keuangan Desa Tanjung Simpang Periode 2022-2024

Tabel 9. Hasil Penelitian Kinerja Keuangan Desa

NO	Jenis Rasio Keuangan Desa	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata rata	Kriteria Penilaian
1	Rasio Kemandirian Keuangan	96,58%	103,46%	114,57%	104,87%	Tinggi (Sangat Mandiri)
2	Rasio Efektivitas Pendapatan	87,94%	104,54%	103,45%	98,64%	Cukup Efektif
3	Rasio Efisiensi Belanja	66,04%	81,82%	76,91%	74,93%	Sangat Efisien

Sumber : Data Diolah 2026

memberikan intisari pemetaan kinerja keuangan Pemdes Tanjung Simpang secara terpadu sepanjang rentang 2022–2024. Berdasarkan akumulasi indikator, struktur keuangan desa memperlihatkan profil yang sangat sehat. Aspek otonomi pembiayaan tercatat Sangat Mandiri (104,87%), tingkat ketercapaian target penerimaan tergolong Cukup Efektif (98,64%), dan alokasi pemanfaatan anggaran belanja terbukti Efisien (74,92%). Temuan komprehensif ini menegaskan tata kelola APBDesa Tanjung Simpang yang higienis, berdaya guna, serta memprioritaskan ketepatan alokasi sumber daya finansial.

4.2.5. Pengujian Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif di atas, berikut adalah ³⁷ pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Rancangan hipotesis pertama (H_1) mengasumsikan bahwa kapasitas kemandirian keuangan Desa Tanjung Simpang pada periode 2022–2024 tergolong masih berada pada tingkat yang rendah. Namun demikian, hasil pengolahan data rasio kemandirian pada Tabel 6 menunjukkan pencapaian sebesar 96,58% ² di tahun 2022, 103,46% di tahun 2023, dan 114,57% di tahun 2024, yang menghasilkan nilai rata-rata sebesar 104,87%.

Dikarenakan perolehan nilai rerata tersebut melampaui batas ambang 75%, maka status kemandirian desa secara resmi masuk ke dalam kategori Tinggi (Sangat Mandiri). Atas dasar fakta empiris ini, maka H_1 Ditolak. Penolakan ini menegaskan bahwa Desa Tanjung Simpang sesungguhnya berstatus sangat mandiri berkat tingginya kontribusi PADes yang sanggup memenuhi sebagian besar porsi kebutuhan pembiayaan daerah secara otonom.

⁸⁴ 2. Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Pada perumusan hipotesis kedua (H_2), diduga bahwa efektivitas pengelolaan pendapatan di Desa Tanjung Simpang periode 2022–2024 berada pada level sangat efektif. Mengacu pada rekapitulasi data Tabel 7, tingkat efektivitas pendapatan tercatat

sebesar 87,94%¹⁸ pada tahun 2022, 104,54% pada tahun 2023, dan 103,45% pada tahun 2024, dengan perolehan rerata tiga tahun sebesar 98,64%.

Berdasarkan skala standar efektivitas, capaian dalam rentang 90% sampai 99% berada pada predikat Cukup Efektif, sedangkan predikat Sangat Efektif menghendaki konsistensi nilai di atas 100%. Berhubung nilai rerata belum menembus ambang batas 100% akibat kinerja tahun 2022 yang sempat tertahan, maka keputusan pengujian menyatakan H_2 Ditolak. Tingkat efektivitas penerimaan Desa Tanjung Simpang secara riil berada pada predikat Cukup Efektif.

³ 3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Hipotesis ketiga (H_3) mengajukan perkiraan bahwa tata kelola belanja Desa Tanjung Simpang berada dalam kriteria sangat efisien. Berdasarkan kalkulasi rasio efisiensi belanja pada Tabel 8, persentase penyerapan belanja berada pada angka 66,04% (2022), 81,82% (2023), serta 76,91% (2024), dengan rata-rata akumulatif mencapai 74,92%.

Sesuai dengan acuan penilaian rasio belanja, interval nilai antara 60% hingga 80% berada dalam kriteria Efisien, sementara kategori Sangat Efisien mensyaratkan rasio di bawah 60%. Oleh karena hasil akhir rata-rata tertahan pada angka 74,92%, maka diputuskan bahwa H_3 Ditolak (atau diterima sebagian pada kategori Efisien). Kendati tidak menembus predikat sangat efisien.

4.3.1 Analisis Kemandirian Keuangan Desa Tanjung Simpang

Tingkat kemandirian ⁸⁷ keuangan desa menjadi tolak ukur utama dalam menilai sejauh mana Pemerintah Desa Tanjung Simpang mampu membiayai operasional pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui Pendapatan Asli Desa (PADes) tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak luar. Berdasarkan kalkulasi data keuangan 2022–2024, rasio kemandirian desa berada pada angka 96,58% (2022), 103,46% (2023), dan 114,57% (2024), sehingga menghasilkan nilai rata-rata sebesar 104,87%.

Sesuai kriteria penilaian kinerja sektor publik, capaian rata-rata yang melebihi angka 75% menempatkan Desa Tanjung Simpang pada kategori Tinggi / Sangat Mandiri dengan pola hubungan otonom. Temuan empiris ini secara langsung membantah hipotesis pertama (H_1) yang menduga bahwa kemandirian keuangan desa masih rendah, sehingga H_1 ditolak. Hasil ini membuktikan bahwa kontribusi PADes Tanjung Simpang sudah sangat dominan dan solid dalam menopang kebutuhan belanja desa secara mandiri.

4.3.2 Analisis Efektivitas Pendapatan Desa Tanjung Simpang

Rasio efektivitas pendapatan menggambarkan tingkat keberhasilan ⁸⁰ pemerintah desa dalam merealisasikan penerimaan kas desa jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBDesa. Pada tahun 2022, rasio efektivitas tercatat sebesar 87,94% (kurang

efektif) akibat penetapan target yang terlalu tinggi. Namun, kinerja ini membaik pada tahun 2023 (104,54%) dan 2024 (103,45%) dengan predikat sangat efektif. Secara kumulatif, rata-rata efektivitas pendapatan periode 2022–2024 mencapai 98,64%

Berdasarkan standar penilaian efektivitas, nilai rata-rata di rentang 90%–99% tergolong dalam kriteria Cukup Efektif. Karena nilai rata-rata akumulatif belum mencapai angka 100%, maka hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa kinerja pendapatan tergolong sangat efektif, dinyatakan ditolak. Walaupun demikian, kenaikan tren dalam dua tahun terakhir mengindikasikan adanya perbaikan kualitas penganggaran penerimaan desa yang semakin realistis.

4.3.3 Analisis Efisiensi Belanja Desa Tanjung Simpang

Rasio efisiensi belanja mengukur tingkat kedisiplinan dan kehematan pemerintah desa dalam mengalokasikan kas pengeluaran terhadap total pendapatan yang diterima pada tahun berjalan. Hasil perhitungan menunjukkan rasio efisiensi sebesar 66,04%¹⁸ pada tahun 2022, 81,82% pada tahun 2023, dan 76,91% pada tahun 2024, dengan rata-rata keseluruhan sebesar 74,93%.

Mengacu pada skala standar efisiensi belanja (di mana predikat 'Sangat Efisien' membutuhkan rasio < 60% dan 'Efisien' berada di rentang 60%–80%), maka tingkat pengelolaan belanja Desa Tanjung Simpang berada dalam kategori Efisien. Hal ini menyebabkan hipotesis ketiga (H_3) yang menduga belanja desa berkategori sangat efisien,

ditolak. Kendati belum mencapai taraf sangat efisien, angka 74,93% membuktikan bahwa aparat desa cukup cermat mengendalikan beban pengeluaran sehingga mampu menjaga keutuhan kondisi fiskal ⁷⁷desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Setelah data dianalisis dan dibahas secara mendalam, penelitian terhadap kinerja keuangan APBDesa di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, menghasilkan kesimpulan pokok sebagai berikut:

Desa Tanjung Simpang menunjukkan kemandirian keuangan yang sangat kokoh. Pencapaian dalam memaksimalkan perolehan PADes menempatkan sektor ini sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan dan operasional desa, sehingga desa terbukti sanggup berdiri sendiri tanpa menggantungkan diri sepenuhnya pada dana transfer dari pusat dan daerah.

Pengelolaan pendapatan desa secara menyeluruh mencerminkan tingkat efektivitas yang tergolong cukup baik. Terdapat peningkatan kualitas tata kelola di mana aparatur desa berhasil mengoreksi kelemahan perencanaan awal. Setelah sempat menetapkan estimasi yang terlampau tinggi, perbaikan sistem perencanaan mampu mendorong pencapaian realisasi pendapatan hingga melampaui target yang diproyeksikan.

Manajemen pengeluaran desa terbukti dijalankan secara efisien dan penuh kehati-hatian. Pemerintah Desa Tanjung Simpang konsisten menerapkan prinsip efisiensi dengan mengontrol alokasi belanja agar tidak melebihi kemampuan kas desa. Pembatasan pengeluaran yang terukur ini

menjaga keberlanjutan fiskal desa sehingga kondisi keuangan tetap sehat dan senantiasa mengalami surplus.

5.2 SARAN

1. Pemeliharaan Otonomi Keuangan Melalui Penguatan Potensi Lokal, guna menjaga momentum kemandirian yang sudah sangat baik, Pemerintah Desa Tanjung Simpang perlu terus mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan baru. Langkah strategis dapat difokuskan pada penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), optimalisasi pemanfaatan aset desa, serta pengembangan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan
2. Penyempurnaan Metode Perencanaan dan Proyeksi Anggaran Dalam rangka menyusun APBDesa yang lebih akurat, pemerintah desa diimbau untuk memperkuat basis data potensi desa. Proyeksi target penerimaan di masa depan sebaiknya disusun berdasarkan pemetaan lapangan yang realistis dan analisis tren periode sebelumnya guna meminimalkan celah perbedaan antara perencanaan dan realisasi kas
3. Pemanfaatan Penghematan Belanja untuk Program Prioritas, prinsip efisiensi anggaran yang telah berjalan dengan baik hendaknya terus dipertahankan dan diarahkan secara tepat sasaran. Penghematan belanja yang berhasil dilakukan perlu dialokasikan kembali pada program-program pemberdayaan masyarakat, perbaikan infrastruktur publik, serta peningkatan kualitas pelayanan publik demi menggenjot kesejahteraan warga desa secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., & Nursyam, A. R. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Toraja Utara Periode 2016-2020. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(2), 149–155.
- Arvita, R. (2022). Pengukuran Kinerja: Sebuah Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Perusahaan. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 3(2), 46–58.
- Brunsson, K. (2017). Organizations and Management. In *The Teachings of Management: Perceptions in a Society of Organizations* (pp. 3–12). Springer.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Handoko, T. H. (2012). *Manajemen*. BPFE.
- Hanita, M., & Handini, W. (2023). Penguatan Kelembagaan Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 5(2), 201–212.
- Harjito, A., & Martono. (2012). *Manajemen Keuangan*. Ekonisia.
- Hasibuan, M. S. P. (2010). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Hernusa, H. L., & Royani, L. (2022). Tinjauan Atas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(3).
- Islamiyah, L., & Faidati, A. (2022). Akuntansi Kewajiban Pemerintah Perspektif KHES dan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Indonesia. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 97–120.
- Janudin, J. (2024). *Manajemen Keuangan*.
- Kurniawan, A. (2024). Peran Otonomi Daerah Dalam Membangun Perekonomian Kabupaten/Kota di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 47–63.
- Masruroh, I. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(4), 22–27.
- Maulana, R. (2022). Analisis faktor penentu yang mempengaruhi stock price pada perusahaan retail trade yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2021. 8(2), 154–166.
- Milla, A. (n.d.). *Administrasi Keuangan*.
- Nasir, M. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekadeotonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*.

- Noerdiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Purba, S. D. W. Y., Kartika, I., Sitanggang, D. C., Saragih, J. P., Herdiansyah, H. A., Sitorus, N., & Ivanna, J. (2023). Peran Aparat Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa Yang Efektif Terhadap Pembangunan. *Journal of Law & Policy Review*, 1(1), 1–9.
- Rondonuwu, G. C., Morasa, J., & Wokas, H. R. (2018). Analisis pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas belanja modal dan belanja pegawai pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03).
- Rosalinda, K. V., & Widajantie, T. D. (2021). The influence of budget accuracy, clarity of budget targets, and managerial control on performance accountability. *Accounting and Finance Studies*, 1(2), 163–174.
- Rosidah, R., & Widjantie, T. D. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 150–153.
- Saputri, S. N., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 53–62.
- Suarsini, N. K. V., Yudiantara, I. G. A. P., & SE, M. (2024). Analisis Realissai Anggaran Belanja Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada Periode 2018-2021. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(3), 158–167.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa*. Pustaka Baru Press.
- Varina, C. E., Priyono, T. H., Prianto, F. W., & Wibisono, S. (2022). Peranan Penggunaan Fiskal Desa Terhadap Kemiskinan Pedesaan di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 21, 37–48.
- Yudartha, P. D., & Winaya, I. K. (2018). Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1).

LAMPIRAN

Gambar 2. Anggaran Desa Tanjung Simpang 2022



Gambar 3. Anggaran Desa Tanjung Simpang 2023



Gambar 4. Anggaran Desa Tanjung Simpang 2024



Tunrnitin Sunny Yonathan.pdf

ORIGINALITY REPORT

35%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com	Internet	258 words — 2%
2	repository.unisi.ac.id	Internet	244 words — 2%
3	dspace.uui.ac.id	Internet	170 words — 2%
4	docplayer.info	Internet	164 words — 2%
5	repository.uin-suska.ac.id	Internet	147 words — 1%
6	media.neliti.com	Internet	132 words — 1%
7	repository.umsu.ac.id	Internet	116 words — 1%
8	repository.unibos.ac.id	Internet	95 words — 1%
9	repository.ub.ac.id	Internet	94 words — 1%
10	ejournal.ugkmb.ac.id	Internet	91 words — 1%
11	repository.uir.ac.id	Internet	81 words — 1%
12	id.123dok.com	Internet	80 words — 1%

13	jurnal.uisu.ac.id Internet	72 words — 1%
14	repository.unhas.ac.id Internet	70 words — 1%
15	conference.um.ac.id Internet	68 words — 1%
16	repository.uhn.ac.id Internet	65 words — 1%
17	ifrelresearch.org Internet	55 words — 1%
18	Musdalipa Musdalipa, Sahade Sahade, Samirah Dunakhir. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2020-2024", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Crossref	51 words — < 1%
19	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	49 words — < 1%
20	id.scribd.com Internet	42 words — < 1%
21	repository.untag-sby.ac.id Internet	42 words — < 1%
22	repository.itbwigalumajang.ac.id Internet	39 words — < 1%
23	repository.nobel.ac.id Internet	38 words — < 1%
24	es.scribd.com Internet	35 words — < 1%
25	Agung Bastanta Purba, Iskandar Sam, Wiralestari. "Financial Performance Analysis of the Sumber Harapan Village Government in Pelepat Ilir District, Bungo Regency for Fiscal Years 2023-2025", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026	34 words — < 1%

26	repository.uinjambi.ac.id Internet	34 words — < 1%
27	www.scribd.com Internet	34 words — < 1%
28	bagumum.blogspot.com Internet	33 words — < 1%
29	coincco.blogspot.com Internet	31 words — < 1%
30	repository.uisu.ac.id Internet	31 words — < 1%
31	repository.unej.ac.id Internet	31 words — < 1%
32	bkpp.jogjapro.go.id Internet	30 words — < 1%
33	layanan.hukum.uns.ac.id Internet	29 words — < 1%
34	Zulkipli Zulkipli, Nasir Hamzah, Junaiddin Zakaria. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kota Makassar", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2021 Crossref	28 words — < 1%
35	text-id.123dok.com Internet	28 words — < 1%
36	repositori.uma.ac.id Internet	26 words — < 1%
37	eprints.undip.ac.id Internet	25 words — < 1%
38	repository.radenintan.ac.id Internet	25 words — < 1%
39	I Putu Ari Sutrisna, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, Cokorda Gede Bayu Putra. "PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	24 words — < 1%

DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DENGAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI", Hita Akuntansi dan Keuangan, 2021

Crossref

40	eprints.umsb.ac.id Internet	24 words — < 1%
41	repository.unsri.ac.id Internet	24 words — < 1%
42	Diana Setyawati, Abu Talkah, Eka Askafi. "Loyalitas: Seberapa Pentingkah bagi ASN di Era Pandemi COVID-19 ?", Otonomi, 2022 Crossref	23 words — < 1%
43	repository.helvetia.ac.id Internet	23 words — < 1%
44	repository.ummat.ac.id Internet	23 words — < 1%
45	ejournal.sunan-giri.ac.id Internet	22 words — < 1%
46	Siti Komariyah, Dwian Eldo. "Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyusunan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 di Desa Dempel Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2026 Crossref	21 words — < 1%
47	eprints.umm.ac.id Internet	21 words — < 1%
48	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet	21 words — < 1%
49	repository.undaris.ac.id:8080 Internet	21 words — < 1%
50	repository.widyatama.ac.id Internet	21 words — < 1%
51	adoc.pub Internet	20 words — < 1%

52	eprints.itn.ac.id Internet	20 words — < 1%
53	repository.unifa.ac.id Internet	20 words — < 1%
54	Assyarofi, Ayu Almas. "Peran Pengelolaan Accounting Information System Dalam Memediasi Hubungan Antara Sistem Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	18 words — < 1%
55	eprints.walisongo.ac.id Internet	17 words — < 1%
56	Berlian Putri Maharini. "ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DANA DESA TAHUN 2018 DI DESA BANGUNTAPAN, KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL)", Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 2019 Crossref	16 words — < 1%
57	yusranlapananda.wordpress.com Internet	16 words — < 1%
58	Afif Nur Rahmadi, Marwita Andarini, Lediyan Lucia, Rita Widyawati. "MENGKALI POTENSI DESA MANGUNREJO, KECAMATAN NGADILUWIH, DI KABUPATEN KEDIRI DALAM PERENCANAAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN", Jurnal Abdi Masyarakat, 2025 Crossref	15 words — < 1%
59	Heru Cahyono, Kurniasih Mufidayati. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN APBD SASAKPANJANG KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR", Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2021 Crossref	15 words — < 1%
60	etheses.uin-malang.ac.id Internet	15 words — < 1%
61	www.coursehero.com Internet	15 words — < 1%
62	eprints.umk.ac.id Internet	14 words — < 1%

63	kc.umn.ac.id Internet	14 words — < 1%
64	repository.usd.ac.id Internet	14 words — < 1%
65	simki.unpkediri.ac.id Internet	14 words — < 1%
66	repository.uinsu.ac.id Internet	13 words — < 1%
67	Sahira Ainul Duha, Mira Mira, Mellisyah Mellisyah. "Analisis Value for Money dalam Mengukur Kinerja Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes (Studi Kasus Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)", Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026 Crossref	12 words — < 1%
68	eprints-tes.ipdn.ac.id Internet	12 words — < 1%
69	repository.fisip-untirta.ac.id Internet	12 words — < 1%
70	repository.uinjkt.ac.id Internet	12 words — < 1%
71	repository.unpas.ac.id Internet	12 words — < 1%
72	www.jurnal-umbuton.ac.id Internet	12 words — < 1%
73	Ferdy Aldiansyah, Henny Andriyani Wirananda. "Analisis Penerapan Good Government Governance pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang)", Jurnal EMT KITA, 2025 Crossref	11 words — < 1%
74	anzdoc.com Internet	11 words — < 1%
75	nanopdf.com	

11 words — < 1%

76 repository.iainpare.ac.id
Internet

11 words — < 1%

77 repository.unisma.ac.id
Internet

11 words — < 1%

78 updesa.com
Internet

11 words — < 1%

79 Eka Ayu Novitasari, Yuwita Ariessa Pravasanti, M. Hasan Ma'ruf.
"Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak
Retribusi Terhadap Belanja Desa", Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, 2024
Crossref

10 words — < 1%

80 Ridhal Rhesa Syahriza, Febriyanto, Ardiansyah Japlani. "Analisis
Kinerja Keuangan Dana Desa Di Desa Keringing Kecamatan Rajabasa
Kabupaten Lampung Selatan", Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI, 2025
Crossref

10 words — < 1%

81 digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet

10 words — < 1%

82 fliphtml5.com
Internet

10 words — < 1%

83 misknppt.files.wordpress.com
Internet

10 words — < 1%

84 novirii21.blogspot.com
Internet

10 words — < 1%

85 www.linovhr.com
Internet

10 words — < 1%

86 Queenzy Victoria Londah, Jantje J. Tinangon, Peter M. Kapojos.
"Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro (SITARO)", Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2026
Crossref

9 words — < 1%

87 Reyyansi Wicen Mokoagouw, Jantje J. Tinangon, Peter M. Kapojos.
"Analisis akuntabilitas dan transparansi APBDes Desa Suluhan

9 words — < 1%

Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018", Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2024

Crossref

-
- 88 Tri Handoko, Bangkit. "Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM) dalam perspektif Total Quality Management (TQM) di MAN 2 Banyumas.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2024
ProQuest 9 words — < 1%
-
- 89 eprints.polsri.ac.id
Internet 9 words — < 1%
-
- 90 pt.scribd.com
Internet 9 words — < 1%
-
- 91 repository.ar-raniry.ac.id
Internet 9 words — < 1%
-
- 92 repository.unim.ac.id
Internet 9 words — < 1%
-
- 93 www.djpk.kemenkeu.go.id
Internet 9 words — < 1%
-
- 94 Muliana, Novia Sandra Dewi. "Comparative Analysis of the Financial Performance of Rambusaratu Village Before and During the 2018-2020 Covid-19 Pandemic", Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA), 2023
Crossref 8 words — < 1%
-
- 95 Rahmatullah, Mamat. "Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 8 words — < 1%
-
- 96 Romsa Endrekson. "Gaya Kepemimpinan Inovatif Progresif Pemerintah Desa dalam Pengambilan Keputusan Penyusunan APBDes", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2019
Crossref 8 words — < 1%
-
- 97 core.ac.uk
Internet 8 words — < 1%
-
- 98 digilib.uinkhas.ac.id
Internet 8 words — < 1%

99	digitallib.iainkendari.ac.id Internet	8 words — < 1%
100	eprint.stieww.ac.id Internet	8 words — < 1%
101	gege-nangkring.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
102	hukum.pinrangkab.go.id Internet	8 words — < 1%
103	jdih.demakkab.go.id Internet	8 words — < 1%
104	repo.apmd.ac.id Internet	8 words — < 1%
105	repositori.unsil.ac.id Internet	8 words — < 1%
106	repository.bakrie.ac.id Internet	8 words — < 1%
107	repository.stiedewantara.ac.id Internet	8 words — < 1%
108	Aras Perma, Suharyono Suharyono. "Proses Penyusunan APB Desa Pemerintah Desa Tanjung Datuk Kecamatan Siak Kecil", Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 2020 Crossref	7 words — < 1%
109	Muhammad Maulana. "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PT BAYAN RESOURCE Tbk Per 2015-2017", Research Journal of Accounting and Business Management, 2018 Crossref	7 words — < 1%
110	Bagaswara Gumpita, Bambang Suhada. "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Didesa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupateng Lampung Timur", Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI, 2021 Crossref	6 words — < 1%
111	Faidhul Mannan, Dairani Dairani, Fathol Bari. "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH	6 words — < 1%

Crossref

112

Nida Putri Rahmayanti. "ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (DD) PADA DESA SUNGAI ASAM, KECAMATAN KARANG INTAN, KABUPATEN BANJAR", AI-KALAM : JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN, 2024

6 words — < 1%

Crossref

113

Shania Nur Chasanah, Jihad Lukis Panjawa. "EVALUASI KINERJA DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG", KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah), 2020

6 words — < 1%

Crossref

114

Sutherland. "Pengaruh Motivasi Kerja, Sistem Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

6 words — < 1%

ProQuest

115

jurnal.unived.ac.id

6 words — < 1%

Internet

EXCLUDE QUOTES ON
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF